

## PEMBINGKAIAN MEDIA ONLINE DALAM PEMBLOKIRAN SITUS ISLAM

**Dono Darsono**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
*darsonodono@yahoo.com*

### ABSTRAK

*This study aims to determine the framing of the news media in presenting blocking of Islamic sites conducted by the Ministry of Communication. The focus of this study was to determine 1) How kompas.com and republika.co.id defining the problems associated to blocking of Islamic sites, 2). How kompas.com and republika.co.id in making moral decisions, 3) How kompas.com and republika.co.id estimating the root cause trouble by blocking Islamic sites? 4) How kompas.com and republika.co.id making moral judgment related to the blocking of Islamic sites of Islam? 5) Bagaimana kompas.com and Republika.co.id giving and stressing the settlement of related blocking Islam sites? The method used in this study was qualitative approach with the method of framing analysis model of Robert N. Entman. The method is considered to be relevant to analyze the news published by Republika.co.id and Kompas.com. The results showed definition of trouble blocking of Islamic sites have political motives, Kompas.com and Republika.co.id see that the source of the alleged cause of the problem is the government's blocking of less unfounded, the media make moral decisions that Islamic sites are not proven further spread of ISIS, and Kompas.com and Republika.co.id recommend resolving cases blocking Islamic sites by consultation and consensus.*

**Keywords:** *Media Framing, Website Blocking, Radicalism.*

### PENDAHULUAN

Isu pemblokiran media Islam oleh Kemenkominfo mengemuka pada bulan Februari sampai Maret 2015. Isu ini bermula dari munculnya kekhawatiran pihak pemerintah akan lahirnya gerakan ISIS, yang membawa aliran Islam radikal sehingga membawa perubahan kehidupan beragama di Indonesia. Pemerintah mengklaim bahwa ada beberapa situs yang dianggap telah mengajarkan berbagai ajaran Islam radikal, sehingga membahayakan keutuhan bangsa, dan bisa merusak persatuan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, muncullah keinginan pemerintah, yang diwakili Kemenkominfo, untuk menutup atau memblokir situs-situs yang

membahayakan tersebut. Wacana sampai aksi pemerintah dalam melakukan pemblokiran ini, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Terutama dari kalangan umat Islam sendiri yang memiliki media *on line* yang sudah lama berdiri, dengan memiliki segmen pembaca luas dan setia. Para pembaca protes karena haknya untuk mendapatkan informasi telah dirampas oleh pemerintah. Berbagai upaya pun dilakukan pembaca untuk membela media yang telah menjadi sumber informasinya, seperti aksi ke jalan untuk melakukan demonstrasi kepada pemerintah, memberikan surat pembelaan terhadap dewan pers atau kemenkominfo dan lain sebagainya.

Begitupun dengan para pemilik dan pengelola media Islam, yang sudah bertahun-tahun menyebarkan informasi melalui media Islam, mempertanyakan langkah pemerintah tersebut. Karena baru sekarang ini ada upaya pemblokiran dari pemerintah, yang dulu pemblokiran sering kali dilakukan oleh rezim Orde Baru. Mereka merasa ada upaya pemberangusan kebebasan pers dalam bersuara menyebarkan informasi tentang keislaman. Dari pejabat sampai mantan pejabat pun ikut angkat bicara perihal polemik pemblokiran situs Islam ini. Prokontra pun terjadi di kalangan elit politik. Sebagian elit mempertanyakan langkah pemerintah menutup situs Islam, sebagian elit politik lain beranggapan, situs Islam yang terselubung mengajarkan faham-faham radikal bisa menyesatkan pembaca.

Berbicara tentang internet, media, dan ideologi, tentunya menjadi isu seksi bagi banyak kalangan. Termasuk umat beragama di Indonesia, terutama dalam memahami ideologi media di balik peran dan fungsi yang dimainkan di dalamnya. Kajian tersebut menjadi kian penting, mengingat pertarungan ideologi dunia yang kian masif, dan kian tajam. Kini, di samping terbuka banyak peluang, umat Islam juga menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang tidak ringan. Kehadiran internet di Indonesia yang mulai populer pada tahun 1990-an merupakan salah satunya. Media yang satu ini di era sekarang ini memang telah menjadi sebuah kunci penting untuk memahami dunia. Internet juga telah menjadi semacam wahana sosial yang memungkinkan terjadinya beragam interaksi sosial antarmanusia di belahan bumi manapun berada.

Gerakan umat Islam melalui berbagai media, terlebih melalui internet, diharapkan akan mengubah wajah Islam di seluruh dunia menjadi lebih baik. Melalui media yang semakin beragam, kata John L. Esposito, umat Islam semakin memiliki alternatif dalam mengakses sejumlah informasi tanpa hambatan. Optimisme Esposito, menurut Asep S. Muhtadi, memang beralasan. Gerakan Islam melalui media akan

menjadi semacam aktivitas global yang tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Melalui media-media baru—khususnya internet—seluruh umat Islam, baik dalam konteks minoritas di dunia Barat maupun di negara-negara muslim mayoritas dapat memiliki akses yang sama terhadap informasi keislaman yang disajikan. Internet memang memiliki kelebihan dibanding media lain yang ada sebelumnya. Melalui internet, siapa pun bisa bergabung dan berinteraksi di dalamnya tanpa harus melalui prosedur yang rumit, hanya cukup dengan bermodalkan akses jaringan. Ketika sudah terkoneksi, siapa pun bisa berinteraksi dengan kapanpun, dan dimana pun.

Penelitian yang terkait analisis tentang ideologi media antara lain penelitian AG. Eka Wenats Wuryanta. Penelitian ini berjudul : “ Ideologi militerisme dan Media Massa: Refresentasi Legitimasi, dan Delegetimasi Ideologi, Studi Analisis Wacana Kritis Media Mssa dalam Situasi Kritis di Indonesia, terutama pada Harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha, Periode 1965 sampai 1968.” Penelitian ini menemukan bahwa situasi social ekonomi dan politik global dan Indonesia mempengaruhi keberadaan dua harian tersebut. Setidaknya, pers berbasis militer ini membawa kepentingan angkat bersenjata, terutama angkatan darat, dalam melakukan perubahan mendasar, melegitimasikan kepentingan kapitalisme birokratif, dengan simblisasi amanat penderitaan rakyat, dan mendelegitimisasikan idea komunis, diktatorial, populistik Soekarmo dan praktek politik borjuistik tradisional..

Mengupas ideologi di balik media, bukan hanya sekadar menarik, tetapi juga penting. Media massa sebagai sarana penyampai informasi kepada masyarakat luas, tentunya memiliki nilai penting dan strategis. Namun sebagaimana dipahami banyak kalangan, media kerap muncul bukan sekadar membawa informasi apa adanya, tetapi juga kerap membawa muatan nilai-nilai ideologi tertentu. Bila merujuk pada pemahaman di atas, setidaknya kita mesti terlebih dulu memahami tentang apa itu ideologi, dan bagaimana pula implikasinya?

Apa itu ideologi? Banyak pakar yang telah mendefinisikannya, di antaranya Alfian, C.C. Rodee, dan Ali Syariati. Alfian mendefinsikan ideologi sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh, dan mendalam tentang bagaimana sesuatu dilakukan dengan cara sebaiknya, yang secara moral dianggap benar dan adil dalam mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Dalam pandangan Rodee, ideologi merupakan sekumpulan yang secara logis berkaitan dan mengindentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi

dan pelakunya. Terkait dengan makna ideologi, Syariati berpendapat, bahwa ideologi adalah keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa atau suatu ras tertentu.

Demikian merujuk beragam pendapat tersebut, setidaknya kita dapat memahami bahwa ideologi merupakan kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Menurut Sobur (2009 : 61), istilah ideologi banyak digunakan dalam ilmu sosial untuk menggambarkan ide-ide tertentu yang diungkapkan dalam komunikasi. Ideologi mempunyai 2 (dua) pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsikan sebagai pandangan dunia (*world view*), yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Sedang secara negatif, ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial.

Terkait dengan perbedaan pemberitaan suatu peristiwa atau realitas oleh media massa tidak hanya sesederhana persoalan teknis jurnalistik. Perbedaan tersebut, dalam pandangan Ahmad Muttaqin (2012) sebagaimana ditulis dalam [ejournal2.stainpurwokerto.ac.id/](http://ejournal2.stainpurwokerto.ac.id/), mewakili hal besar dan bersifat kompleks yang menjadi paradigma dan panduan berpikir, bertindak, serta bersikap setiap individu yang berkecimpung dalam suatu lembaga media massa. Konteks ini yang kemudian disebut dengan ideologi media massa. Ia juga menegaskan, ideologi media massa diformulasikan secara abstrak melalui komoditas utamanya berupa berita. Instrumen utama berita adalah bahasa yang terdiri dari beberapa unsur seperti kata, kalimat, frase, dan struktur kebahasaan lainnya. Melalui instrumen inilah ideologi media massa direpresentasikan. Bahasa bukan sebatas sebagai perangkat teknis komunikasi tetapi juga sebagai praktik ideologi dan kekuasaan. Dengan ideologi yang berbeda, berita media massa tentang satu peristiwa akan mengesankan kecenderungan berbeda sesuai dengan ideologi yang melingkupinya.

Adapun kata Teun van Dijk (Badara, 2012 : 34), ideologi merupakan satu konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat kritis. Hal tersebut karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari suatu praktik ideologi atau pencerminan dari suatu ideologi. Teori-teori klasik tentang ideologi di antaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan untuk memproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya ialah dengan

membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken for granted*. Wacana dalam pendekatan semacam itu dipandang sebagai medium oleh kelompok yang dominan, untuk mempersuasi dan mengomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga tampak sah dan benar. Sebuah teks, demikian kata Van Zoest (1991 : 70), tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah ideologi. Kaitannya dengan budaya kritis, tidaklah mengherankan bila kemudian aspek ideologi menjadi salah satu perhatian, selain kesadaran dan hegemoni.

Bertolak dari pemikitan itulah maka mengkaji ideologi media di balik berita pemblokiran situs-situs Islam menjadi menarik dan penting. Terlebih terkait dengan bagaimana *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dalam melakukan pembingkai terhadap peristiwa tersebut baik terkait dengan pendefinisian masalah, sumber penyebab, maupun keputusan moral terkait pemblokiran situs Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis framing yang dikembangkan Robert N. Entman. Data utama penelitian ini bersumber dari berita-berita yang terkait pemblokiran situs Islam di *Kompas.com* dan *Republika.co.id* mulai 25 Maret sampai dengan 25 April 2015. Untuk memperkuat data, rujukan, dan analisis, peneliti juga melakukan pengumpulan berbagai tulisan dari media cetak, buku, dan jurnal ilmiah.

*Republika Online* (ROL) hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian *Republika* terbit. ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks. Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya.

Menurut Wikipedia, *Republika* adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat Islam, khususnya para wartawan profesional muda yang dipimpin oleh ex wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang saat itu diketuai BJ Habibie dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya

tersebut berbuah. Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993. Koran ini terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi Bangsa. Setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media.

PT Abdi Bangsa selanjutnya menjadi perusahaan induk, dan Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT Abdi Bangsa. Di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan Majalah Golf Digest Indonesia, Majalah Parents Indonesia, stasiun radio Jak FM, Gen FM, Delta FM, FeMale Radio, Prambors, Jak tv, dan Alif TV. Walau berganti kepemilikan, Republika tak mengalami perubahan visi maupun misi. Namun harus diakui, ada perbedaan gaya dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat. Karena itu, secara bisnis, koran ini terus berkembang. Republika menjadi makin profesional dan matang sebagai koran nasional untuk komunitas muslim.

*Kompas.com* dimulai pada tahun 1995 dengan nama *Kompas Online*. *Kompas Online* pada awalnya hanya berperan sebagai edisi internet dari *Harian Kompas*. Kemudian tahun 1998, *Kompas Online* bertransformasi menjadi *Kompas.com* dengan berfokus pada pengembangan isi, desain, dan strategi pemasaran yang baru. *Kompas.com* pun memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di Indonesia. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008, *Kompas.com* tampil dengan perubahan penampilan yang signifikan. Mengusung ide “Reborn”, *Kompas.com* membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya. Menjadi lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur user-friendly dan advertiser-friendly. Sinergi ini menjadikan *Kompas.com* sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, hingga live streaming. Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif *Kompas.com* di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan, dan total 40 juta page views/impression per bulan. Saat ini, *Kompas.com* telah mencapai 120 juta page view perbulan. Pada tahun tersebut juga mulai ditampilkan *channel-channel* atau kanal-kanal di halaman depan *Kompas.com*. Kanal-kanal ini didesain sesuai dengan tema berita dan membuat setiap pengelompokan berita memiliki karakter.

*Kompas.com* juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep citizen journalism dalam *Kompasiana*. Setiap anggota

Kompasiana dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan. Kompasiana, yang setiap hari melahirkan 300 hingga 400 tulisan telah berhasil membangun komunitas jurnalisme warga yang mencapai 50.000 anggota. Sebagai portal berita yang mengikuti perkembangan teknologi terkini, kini selain bisa diakses melalui handphone atau dapat diunduh sebagai aplikasi gratis di smartphone BlackBerry, KOMPAS.com juga tampil dalam format iPad dan akan terus tumbuh mengikuti teknologi yang ada. Pada tahun 2013, Kompas.com kembali melakukan perubahan yaitu, tampilan halaman yang lebih rapi dan bersih serta fitur baru yang lebih personal. Setiap orang memiliki preferensi dan kebutuhan berita yang berbeda. Kompas.com mencoba memahami kebutuhan pembaca yang beragam dengan menghadirkan fitur Personalisasi. Jadi, pembaca dapat dengan mudah memilih sendiri berita apa yang ingin mereka baca.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Frame Republika co.id**

*Republika co.id* atau *Republika On Line (ROL)* menurunkan lima berita mengenai kasus pemblokiran situs Islam ini. Masing-masing dengan judul : “Pembaca Panjimas.com Protes Rencana Blokir Kemenkominfo”, “*Netizen*: Situs Islam Diblokir, Situs PKI Dibiarkan”, “Kepala BIN: Kita Harapkan Situs Radikal Diberi Perhatian Khusus”, “Ini Alasan Kemenkominfo Blokir 19 Situs Radikal”, “Meme Tifatul Blokir Situs Porno, Rudiantara Blokir Situs Islam”.

Melihat pada kelima berita yang dimuat di *Republika co.id*, kebanyakan media ini menghadirkan berita dari sisi pihak yang dirugikan oleh pemerintah yang akan memblokir beberapa situs yang dianggap radikal dan membahayakan. Pihak-pihak ini mempertanyakan upaya dan hal-hal yang dilakukan pemerintah yang terkesan sepihak, bahkan ada upaya terselubung di balik pemblokiran situs-situs Islam.

*Problem Identification.* *Republika co.id* mengidentifikasi pertama-tama kasus pemblokiran situs Islam ini sebagai masalah politik. Segala hal yang berhubungan dengan kasus pemblokiran situs Islam ini disoroti tidak dari segi lain, tetapi dari aspek politik. Ada beberapa alasan kenapa kita bisa

mengatakan bingkai politik sebagai bingkai yang dominan dalam pemberitaan Republika co.id. *pertama*, porsi berita banyak yang memuat dari aspek ketidakpuasan masyarakat terhadap upaya dan tindakan yang dilakukan pemerintah dengan langsung memblokir situs Islam yang dianggap membahayakan, tanpa ada upaya dari pemerintah untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam. *Kedua*, berita-beritanya menghadirkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah, dan berita-berita menunjukkan upaya yang tidak jelas dan transparan, mengenai upaya pemerintah yang tiba-tiba menutup situs Islam. *Ketiga*, terlihat jelas bagaimana Republika co.id ingin menegakkan kebebasan pers yang kembali diancam oleh pemerintah. Upaya pemblokiran situs Islam merupakan upaya terencana dalam memblokir kebebasan pers yang telah didapatkan pasca reformasi.

Bisa dilihat pada beberapa pemberitaan di Republika co.id kalau upaya pemerintah yang memblokir situs Islam adalah tidak jelas, yaitu cenderung politis. Berikut beberapa beritanya:

*"Sejauh ini, saya tidak melihat bahwa situs-situs tersebut adalah penyebar radikalisme atau simpatisan radikalisme. Justru sebaliknya, situs tersebut banyak memberikan pencerahan tentang Islam yang baik dan benar. Sehubungan dengan hal tersebut, jika memang info tersebut benar, dengan ini saya nyatakan PROTES KERAS atas pemblokiran situs-situs Islam bermanfaat tersebut dengan alasan terkait radikalisme Islam," lanjutnya.*

*Alfa Saputra™ juga mempertanyakan kinerja Kemenkominfo yang bertindak sangat aneh. "Wow 19 situs islam diblok ya? Padahal ga semuanya berisi negatif, yg PKI didiemin aja. @kemkominfo kok jadi aneh gini? #KembalikanSitusIslam," katanya melalui @alfasaputra.*

*Pepey melalui akun @ferdianprasetya mengingatkan Menkominfo Rudiantara untuk bertindak bijak. Pasalnya, situs Islam diblokir, sementara situs yang berisi tentang PKI dibiarkan saja.*

*"Ini yg di blok @rudiantara\_id Situs PKI malah bebas. @kemkominfo."*

**Tabel 1** Lima Berita Republika Terkait Pemblokiran Situs Islam

Judul	Isi Berita/Wawancara	Sumber Berita
Pembaca Panjimas.com	Republika mengangkat keberatan para pembaca panjimas.com yang akan diblokir oleh depkominfo	Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo (Ismail Cawidu)
Protes Rencana Blokir Kemenkominfo		
Netizen: Situs Islam Diblokir, Situs PKI	Republika co.id memberitakan berbagai komentar dan	Arridho Sudjiman (pemilik akun)



Dibiarkan	tanggapan dari para netizen perihal pemblokiran 19 media Islam. Mereka mempertanyakan langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menindaklanjuti permintaan BNPT	DenMacho), Alfa Saputra (pemilik akun @alfasaputra)
Kepala BIN: Kita Harapkan Situs Radikal Diberi Perhatian Khusus	Republika co.id memberitakan akan terus berusaha mengawasi propaganda yang dilakukan ISIS dengan mengajak WNI menjadi pendukungnya.	Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail Cawidu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman
Ini Alasan Kemenkominfo Blokir 19 Situs Radikal	Republika co.id memberikan alasannya memblokir situs-situs yang dianggap radikal dan membahayakan	Kepala Humas Kemenkominfo (Ismail Cawidu)
Meme Tifatul Blokir Situs Porno, Rudiantara Blokir Situs Islam	Republika co.id memberitakan bahwa terjadi pro kontra di dunia maya, akan usaha pemblokiran media Islam di on line	pemilik akun @muinulhaq, Noor Al Kautsar pemiliki akun @ALakaUCAY

*Causal Interpretation.* Dalam keseluruhan berita Republika co.id, pemerintah (Kemenkominfo) diposisikan sebagai pelaku (aktor), sebagai penyebab masalah. Kemenkominfo yang diwakili menteri, Rudiantara, ditempatkan sebagai sebab yang mengakibatkan berbagai masalah tersebut. Di sini letak dan awal masalah bukan pada situs Islam, yang dituduh telah menyebarkan berbagai informasi radikal yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara oleh Kemenkominfo. Masalah sebaliknya diletakkan pada diri Rudiantara, orang yang pertama kali mengungkap dan menyebarkan bahaya dari situs Islam. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana teks berita tersebut yang menempatkan penilaian politik lebih banyak kepada pemerintah.

Bisa dilihat pada pernyataan para sukarelawan dan pecinta situs Islam yang dikutip Republika co.id berikut ini:

*"Kepada Kementerian Kominfo, Saya adalah salah satu pengakses situs Panjimas.com, Hidayatullah.com, Muslimdaily.net, Eramuslim.com dan lain-lain yang dari sana saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di situs tersebut juga dimuat artikel-artikel Islami yang sangat berguna," demikian isi surat keberatan pembaca itu.*

*"Sejauh ini, saya tidak melihat bahwa situs-situs tersebut adalah penyebar radikalisme atau simpatisan radikalisme. Justru sebaliknya, situs tersebut banyak memberikan pencerahan tentang Islam yang baik dan benar. Sehubungan dengan hal tersebut, jika memang info tersebut benar, dengan ini saya nyatakan PROTES KERAS atas pemblokiran situs-situs Islam bermanfaat tersebut dengan alasan terkait radikalisme Islam," lanjutnya. Selain itu, Panjimas.com juga menyarankan, bagi kaum muslimin yang ingin mengirim pembelaannya terkait pembredelan media islam, bisa menggunakan contoh surat keberatan atas pembredelan media Islam, yang dikirimkan melalui alamat email ke [bah002@kominfo.go.id](mailto:bah002@kominfo.go.id) atau [keaduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:keaduankonten@mail.kominfo.go.id).*

Berikutnya kita juga bisa melihat bagaimana pernyataan-pernyataan dari masyarakat pengguna situs Islam yang mempertanyakan langkah yang dilakukan pemerintah yang tidak memiliki alasan kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Berikut kutipan pernyataannya dalam Republika.co.id:

*Akun milik Arridho Sudjiman mempertanyakan pemblokiran situs Islam tersebut. Pasalnya, situs tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dikelola warga Indonesia, malah tidak diusik. Dia pun mengunggah foto sebuah situs yang membahas tentang komunis dan PKI.*

*"Situs dkwah diblokir, situs PKI yg nyata2 dilarang UU malah bebas. Negeri yg aneh! #KembalikanMediaIslam," katanya melalui @DenMacho.*

*Alfa Saputra™ juga mempertanyakan kinerja Kemenkominfo yang bertindak sangat aneh. "Wow 19 situs islam diblok ya? Padahal ga semuanya berisi negatif, yg PKI didiemin aja. @kemkominfo kok jadi aneh gini? #KembalikanSitusIslam," katanya melalui @alfasaputra.*

*Pepey melalui akun @ferdianprasetya mengingatkan Menkominfo Rudiantara untuk bertindak bijak. Pasalnya, situs Islam diblokir, sementara situs yang berisi tentang PKI dibiarkan saja. "Ini yg di blok @rudiantara\_id Situs PKI malah bebas. @kemkominfo."*

Dari sini sudah mulai kelihatan, bagaimana pemerintah (Rudiantara, menteri kemenkominfo) ditempatkan dalam keseluruhan berita sebagai penyebab masalah. Sebaliknya media Islam atau situs Islam secara tidak langsung dipandang sebagai korban dari tindakan Kemenkominfo.

*Moral Evaluation.* Penilaian atas Rudiantara sebagai sumber masalah ini datang dari dua hal yang sama-sama negatif terhadap Rudiantara. *Pertama*, adanya sensasi dari pengganti Tifatul Sembiring ini. Dulu ketika Tifatul Sembiring ini berhasil memblokir situs-situs yang dianggap porno. Rudiantara ingin ada maneuver yang bisa mengangkat citranya di hadapan publik dan presiden tentunya. *Kedua*, adanya intervensi dari BIN yang meminta Kemenkominfo untuk memblokir. BIN merekomendasikan beberapa situs berbahaya untuk segera ditutup. Padahal jauh sebelum ISIS beredar luas, situs-situs itu sudah lama beroperasi dan melayani pembacanya.

*Treatment Recommendation.* Atas semua pemberitaan Republika.co.id tentang pemblokiran situs Islam, Republika.co.id merekomendasikan agar kasus ini diselesaikan secara professional, yang melibatkan berbagai pihak dengan keahlian dan kedudukannya. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai masalah politik. Karena kalau dibiarkan mawacana tanpa ada alat bukti yang kuat, maka polemik akan terus bergulir. Pemerintah harus melibatkan praktisi, dan para pakar untuk mengkaji setiap konten yang dianggap membahayakan, kalau terpaksa ditutup atau diblokir sebaiknya diperlihatkan mana saja yang dianggap berbahaya. Jadi tidak sepihak langsung memvonis dengan mengemukakan beberapa situs yang harus diblokir, sehingga mengundang reaksi keras dari masyarakat pembaca situs bersangkutan.

**Tabel 2** Bingkai Republika Terkait Pemblokiran Situs Islam

<i>FRAME</i>	<b>Republika.co.id</b>
<i>Problem Identification</i>	Masalah politik
<i>Causal Interpretation</i>	Upaya pemblokiran yang tidak rasional dan bertanggungjawab
<i>Moral Evaluation</i>	Merugikan pembaca, media, dan menodai kebebasan informasi
<i>Treatment Recommendation</i>	Pemerintah (kemenkominfo) dan media Islam ( <i>on line</i> ) duduk bersama

untuk membahas *content* (berita)

---

Bingkai Kompas.com. Mengenai kasus pemblokiran situs Islam oleh pemerintah (Kemenkominfo), kompas.com mempublikasikan beritanya kurang lebih ada lima. Jumlah beritanya sama dengan berita yang dimuat di Republika co.id.

Adapun judul-judul berita tersebut terdiri dari: “Menkominfo: Lebih Susah Blokir Situs ISIS daripada Situs Porno”, “Tifatul: Blokir Situs ISIS Enggak Bakalan Mempan”, “Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Blokir Situs yang Dianggap Radikal”, “Wapres: Saya Minta Periksa Konten Situs, Jangan Asal Blokir!” “Tantowi: Blokir Situs Islam Beda Tantangannya dengan Situs Porno.”

Berdasarkan data yang ada, secara umum Kompas.com pun menolak, dan secara tidak langsung melakukan protes terhadap apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo yang melakukan aksi-aksi pemblokiran terhadap media online berbasis Islam. Bukan pada isi berita, penolakan ini didasarkan pada ketidaksetujuan Kompas.com akan aksi tersebut, karena aksi tersebut telah merusak kebebasan pers, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, dan kebebasan menyebarkan informasi.

Mengenai bingkai media Kompas.com bisa dilihat pada beberapa sub bagian berikut; *Pertama, Problem Identification*. Frame atau bingkai yang dikembangkan Kompas.com terhadap kasus pemblokiran media Islam (on line) oleh Kemenkominfo adalah berbau politik. Kenapa masuk pada kategori politik? Ada beberapa alasan kuat yang bisa membuktikan hal itu. *Pertama*, Kemenkominfo yang mewakili pemerintah bertindak seperti era rezim Orde Baru terhadap media atau pers, yaitu hal ihwal pemberitaan media yang dianggap berbahaya langsung dibredel atau blokir. Di sini pemerintah menggunakan pendekatan kekuatan dan kekuasaan. *Kedua*, alasan pemerintah yang langsung memblokir media on line Islam, tidak dilakukan investigasi dan pengkajian secara intensif, komprehensif, dan mendalam terlebih dahulu. Ini kesannya sepihak dan ada tujuan politik di balik semua ini.

Berbeda kalau dilakukan kajian secara mendalam, sehingga dari hasil kajian dan penelitian tersebut, bisa menghasilkan bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik pembaca, kalau media bersangkutan berbahaya karena menyebarkan paham-paham radikal dan lain sebagainya, yang bertentangan dengan Pancasila dan sebagainya. Di sini kredibilitas pemerintah dipertanyakan untuk urusan kebebasan pers. Termasuk langkah yang diambil pemerintah tergolong sembrono, karena tindakan yang dilakukan pemerintah sama dengan memperlihatkan tindakan otoriter pemerintah. Padahal sejak pasca reformasi, otoriter sebuah kekuasaan menjadi tabu untuk dibahas apalagi ini dilakukan.

Mengenai aksi-aksi pemerintah yang tidak memperlihatkan profesionalisme dan kehebatan pemerintah dalam bertindak, bisa dilihat pada table di bawah ini. Mulai dari judul berita, isi berita, dan narasumber yang digunakan oleh Kompas.com.

Untuk beberapa berita yang bisa dilihat dan dijadikan landasan kalau ini sebagai upaya politik pemerintah perihal pemblokiran situs Islam, yaitu:

*JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengaku tidak sepakat upaya pencegahan paham radikal Negara Islam di Irak dan Suriab (ISIS) dilakukan melalui pemblokiran situs. Menurut Tifatul, penyebaran paham tidak akan mempan jika pemerintah terlalu berfokus memblokir situs-situs radikal.*

*"Kalau menurut saya, karena ini paham, pendekatannya bukan blokir-blokiran, tapi harus persuasif. Kalau ideologi tidak boleh dengan menembak dan blokir sana-sini. Saya tidak setuju dengan cara BNPT dan Densus, nggak bakal mempan," ucap Tifatul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/3/2015).*

*Menurut dia, yang paling utama perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan melakukan penyadaran akan paham Islam yang dianggap salah.*

***JAKARTA, KOMPAS.com** - Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyalahkan ketergesaan pemerintah dalam menutup secara sepihak situs-situs web yang dicurigai menyebarkan paham radikalisme. Ia menilai pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam melakukan pemblokiran sehingga dikhawatirkan menumbuhkan sikap saling curiga di tengah masyarakat.*

*Saleh mengatakan, pemerintah memblokir belasan situs tanpa klarifikasi terlebih dulu. Padahal, kata Saleh, seharusnya ada pendalaman mengenai substansi materi yang disebar oleh situs-situs yang diduga menyebarkan ajaran menyimpang.*

*"Kalau langsung ditutup, kesannya pemerintah sangat otoriter. Tidak ada ruang diskusi dan klarifikasi, sedikit berbeda, langsung dibungkam," kata Saleh, Selasa (31/3/2015), di Jakarta.*

*Anggota Fraksi PAN itu menilai pemerintah belum memiliki standar baku sebagai rujukan dalam mengidentifikasi situs-situs penyebar paham radikalisme. Ia berharap tindakan ini tidak berlanjut karena dapat mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi oleh undang-undang. Ia khawatir ada pemahaman keliru dan kesan negatif pada agama tertentu setelah pemerintah secara sepihak memblokir situs-situs tersebut.*

*"Menurut saya, tidak semua situs yang diblokir itu menyebarkan paham radikalisme. Ada di antaranya yang betul-betul dipergunakan sebagai media dakwah," ujarnya.*

*BNPT melalui surat Nomor 149/K.BNPT/3/2015 meminta 19 situs diblokir karena dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme dan sebagai simpatisan radikalisme.*

**Tabel 3** Lima Berita Kompas Terkait Pemblokiran Situs Islam

---

<b>Judul</b>	<b>Isi Berita/Wawancara</b>	<b>Sumber Berita</b>
--------------	-----------------------------	----------------------

---

Menkominfo: Lebih Susah Blokir Situs ISIS daripada Situs Porno	<b>KOMPAS.com</b> memberitakan bahwa penyebaran paham radikal yang dilakukan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) melalui dunia maya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Dan pemblokiran situs terkait terorisme lebih sulit daripada memblokir situs porno.	Rudiantara (Menkominfo)
Tifatul: Blokir Situs ISIS Enggak Bakalan Mepan	<b>KOMPAS.com</b> memberitakan bahwa menurut Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring tidak sepakat upaya pencegahan paham radikal Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dilakukan melalui pemblokiran situs.	Tifatul Sembiring (Majelis Syuro PKS),
Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Blokir Situs yang Dianggap Radikal	<b>KOMPAS.com</b> memberitakan bahwa Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyayangkan ketergesaan pemerintah dalam menutup secara sepihak situs-situs <i>web</i> yang dicurigai menyebarkan paham radikalisme.	Ketua Komisi VIII DPR RI (Saleh Partaonan Daulay)
Wapres: Saya Minta Periksa Konten Situs, Jangan Asal Blokir!	<b>KOMPAS.com</b> mengungkap pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tidak sembarangan memblokir situs, meskipun diminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).	Wakil Presiden RI (Yusuf Kala)
Tantowi: Blokir Situs Islam Beda Tantangannya dengan Situs Porno	<b>KOMPAS.com</b> memberitakan perihal Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya yang mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs yang diduga mengandung paham radikalisme.	Wakil Ketua Komisi I DPR (Tantowi Yahya)

*Causal Interpretation.* Dalam keseluruhan berita Kompas.com, pemerintah yang diwakili kemenkominfo, Rudiantara, diposisikan sebagai aktor yang menyebabkan mencuatnya wacana, konflik, pro kontra di kalangan pemerintah dengan kalangan pembaca media on line Islam, sehingga menyebabkan masalah besar dalam kasus pemblokiran situs media Islam. Sebaliknya, media on line Islam dipandang dan diposisikan sebagai korbannya.

Media Kompas.com, memperlihatkan posisi dan sikapnya pada kasus ini, bisa dilihat pada dua berita dengan judul “Pemerintah Diminta

Tak Buru-buru Blokir Situs yang Dianggap Radikal” dan “Wapres: Saya Minta Periksa Konten Situs, Jangan Asal Blokir!” Dari sini Kompas.com membingkai bahwa pemerintah telah melakukan blunder dan kesalahan besar ketika memblokir situs media Islam. Pemerintah juga telah bertindak tanpa berfikir panjang akan efek negatif yang dilakukannya, dengan pemblokiran terhadap situs-situs Islam dengan jumlah pembaca yang banyak dan fanatik. Tidak salah setelah beberapa pemblokiran situs Islam, begitu ramai di mana-mana terjadi pengecaman, demonstrasi, dan berbagai aksi sebagai bentuk protes atas tindakan pemerintah.

Kompas.com juga memperlihatkan sisi upaya pemerintah yang intensif, berupaya terus dalam memblokir situs-situs Islam. Kita bisa lihat pada ketiga judul berita dengan judul, “Menkominfo: Lebih Susah Blokir Situs ISIS daripada Situs Porno”, “Tifatul: Blokir Situs ISIS Enggak Bakal Mempan”, “Tantowi: Blokir Situs Islam Beda Tantangannya dengan Situs Porno”, dari ketiga berita yang dimuat oleh Kompas.com, kita bisa melihat bagaimana pbingkai Kompas.com terhadap pemerintah, bahwa pemerintah sebenarnya sudah sejak lama ingin memblokir situs-situs Islam. Misalnya dalam pernyataan Tifatul Sembiring bahwa situs Islam tidak mudah untuk diblokir. Kita tahu bahwa Tifatul adalah mantan orang nomor satu di Kemenkominfo. Itu artinya dia pernah melakukan upaya untuk memblokir situs Islam. Kemudian kemenkominfo sendiri, Rudiantara, yang mengatakan susah untuk memblokir situs Islam. Ini artinya Rudiantara sudah berkali-kali berupaya memblokir situs Islam. Termasuk Tantowi Yahya selaku pihak pemerintah, yang menyatakan bahwa akan mendapat tantangan dan kendala berarti ketika ingin memblokir situs Islam.

*Moral Evaluation.* Penilaian atas pemerintah sebagai sumber masalah ini bukan tidak ada alasan yang cukup kuat. Kompas.com membuktikannya dengan beberapa berita. Kompas.com yang secara tidak langsung menyalahkan pemerintah dengan memblokir situs Islam bukan tidak beralasan. Bisa dilihat pada berita berikut:

*“Dia mencontobkan, situs YouTube yang menampilkan video anak-anak Indonesia yang diduga ikut ISIS akhirnya dihapus setelah ada permintaan dari Pemerintah Indonesia.”*



Dalam berita di atas pemerintah sudah memperlihatkan arogansinya dengan memblokir situs Islam di You Tube, padahal ini baru dugaan anak-anak Indonesia yang ikut ISIS. Belum jelas kebenaran dan buktinya tidak ada sama sekali.

Kompas.com juga memperlihatkan bagaimana upaya pemblokiran yang sesungguhnya sudah dilakukan sejak lama, bisa dilihat pada pernyataan yang dimuat Kompas.com berikut ini:

*“Saat menjadi Menkominfo dulu, Tifatul mengaku sudah memblokir lebih dari 40 video terkait ISIS di YouTube. Namun, untuk mendeteksi video-video ini, Kemenkominfo harus terus-menerus menyisirnya setiap hari dengan mencari kata kunci yang berbeda-beda.”*

Kesalahan lainnya yang dilakukan pemerintah ialah mengenai ketergesaan dalam melakukan pemblokiran situs Islam, bisa dilihat pada berita berikut:

*“Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyayangkan ketergesaan pemerintah dalam menutup secara sepihak situs-situs web yang dicurigai menyebarkan paham radikalisme. Ia menilai pemerintah terlalu tergesa-gesa dalam melakukan pemblokiran sehingga dikhawatirkan menumbuhkan sikap saling curiga di tengah masyarakat.”*

*Treatment Recommendation.* Atas semua peran pemerintah dalam memblokir situs Islam tersebut, Kompas.com merekomendasikan agar kasus ini dibawa ke pengadilan kemudian duduk bersama antara perwakilan media, dewan pers dan pemerintah. Ini sebagai konsekuensi logis dari melihat kasus ini sebagai masalah politik. Karena pemerintah tidak bisa memperlihatkan bukti yang kuat kalau media-media atau situs-situs yang diblokirnya itu telah mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan pembacanya. Sementara pemerintah merupakan penguasa yang berkuasa atas berbagai kegiatan media di dalamnya. Pemerintah yang seharusnya mengatur tata kelola media bukan mengintervensi kegiatan media. pemerintah harus meninjau ulang peraturan dan undang-undang informasi atau pers yang sudah banyak dibuat pemerintah.

Media Kompas.com juga dalam pemberitaannya mengenai kasus pemblokiran situs Islam ini, menghimbau kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam bertindak. Jangan emosional dan tanpa memikirkan panjang dampak dari tindakannya. Karena bagaimana pun juga,

pemerintah akan dilihat, diawasi, dan menjadi contoh teladan terhadap masyarakatnya. Sebelum bertindak harus ada payung hukum, aturan yang jelas seperti undang-undang kebebasan bersuara atau kebebasan pers yang mengatur konten yang mengajarkan ajaran-ajaran menyesatkan dan lain sebagainya. Jadi tindakannya pemerintah berdasar dan sesuai dengan aturan yang ada.

**Tabel 4** Bingkai Kompas Terkait Pemblokiran Situs Islam

---

<i><b>FRAME</b></i>	<b>Kompas.com</b>
<i>Problem Identification</i>	Masalah politik
<i>Causal Interpretation</i>	Pemblokiran sepihak oleh pemerintah terhadap situs Islam
<i>Moral Evaluation</i>	Pemerintah terlalu buru-buru memblokir situs Islam
<i>Treatment Recommendation</i>	Duduk bersama antar pihak terkait

---

#### **Perbandingan Frame Republika co.id dan Kompas.com**

Pembahasan di atas menunjukkan bagaimana peristiwa yang sama bisa dimaknai dan didefinisikan secara berbeda. Pendefinisian yang berbeda tersebut menyebabkan peristiwa bisa berubah secara total. Namun untuk konteks kasus pemblokiran situs Islam di kedua media, yaitu Republika co.id dan Kompas.com keduanya memaknai dan mendefinisikan kasus pemblokiran sama. Meskipun ada beberapa perbedaan sedikit namun tidak terlalu signifikan. Karena pada umumnya keduanya memiliki definisi yang sama.

Republika co.id dan Kompas.com keduanya mendefinisikan kasus pemblokiran situs Islam ini sebagai masalah politik. Persoalannya bisa dilihat pada siapa yang salah, siapa yang benar, dan aturan-aturan sebuah media layak diblokir atau tidaknya. Semua membingkai berita sama, yaitu siapa yang salah adalah pemerintah dalam hal ini kemenkominfo yang terlalu cepat melakukan blokir tanpa ada upaya yang terukur, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan dalam mengkaji atau penelitian mendalam terhadap sebuah isu sebelum dieksekusi diblokir atau tidak.

Kemudian kedua media ini pun secara tidak langsung menyatakan bahwa pemilik, pengelola dan jurnalis dari situs Islam merupakan pihak yang dirugikan dengan dibredel, maka otomatis mereka kehilangan mata pencaharian, menanggung beban moral dan mental karena tempatnya bernaung, mengekspresikan ide dan lain sebagainya diblokir. Padahal belum tentu medianya menyebarkan informasi-informasi keagamaan (ajaran Islam) yang menyesatkan pembacanya.

Padahal saat ini, melalui media yang semakin beragam, kata John L. Esposito, umat Islam semakin memiliki alternatif dalam mengakses sejumlah informasi tanpa hambatan. Kemudian optimisme Esposito ini ditanggapi oleh Asep S. Muhtadi, bahwa gerakan Islam melalui media akan menjadi semacam aktivitas global yang tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Melalui media-media baru—khususnya internet—seluruh umat Islam, baik dalam konteks minoritas di dunia Barat maupun di negara-negara muslim mayoritas dapat memiliki akses yang sama terhadap informasi keislaman yang disajikan.

Pemblokiran yang dilakukan pemerintah, oleh kedua media dibingkai sebagai bentuk pemerintah yang tidak mampu menyikapi fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat. Padahal meskipun sedang ramai ISIS yang berkejolak di Timur Tengah, seharusnya pemerintah tidak reaktif dengan secara instan memblokir situs-situs Islam. Sikap dan tindakan pemerintah yang reaktif ini dikesani bahwa pemerintah tidak memperlihatkan kematangan dalam berfikir, kedewasaan dalam bertindak, walhasil efek dari tindakannya ini menjadi *boomerang* terhadap pemerintah sendiri. Akhirnya pemerintah mendapat penilaian jelek di mata masyarakat pembaca, dan diapresiasi negatif pula oleh para pengelola, pemilik, dan pecinta media. Yang paling mengkhawatirkan adalah pemerintah kembali menunjukkan sikap anti media, dan tidak siap dengan adanya kebebasan pers. Pembredelan ini sebagai salah satu bukti kalau pemerintah ada niatan ingin membungkam pers sebagaimana era rezim Orde Baru.

Pemblokiran oleh pemerintah ini bukan tidak beralasan, karena menurut Muttaqin media massa dalam era industrialisasi saat ini, lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi. Lebih lanjut Muttaqin, mengatakan bahwa kolaborasi dengan kelompok ideologis, tidak berarti

bahwa proses produksi dan reproduksi media massa juga bersifat ideologis. Produksi dan reproduksi wacana agama lebih dijadikan sebagai simbol identifikasi atau bentuk komitmen kolaboratif antara media massa dan kelompok ideologis. Proses simbolisasi ini secara ekonomis akan memberikan keuntungan kapital bagi media massa dengan keterjaminan pasar (pembaca) dari kelompok dan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan ideologi tertentu. Determinasi kepentingan kapital dalam tubuh media massa tidak jarang memberikan “tontonan” tersendiri bagi masyarakat terutama pada isu-isu agama yang menjadi kontroversi.

Bisa jadi juga alasan pemerintah ketika membredel atau memblokir situs Islam yang dianggap mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sebagaimana juga dikatakan Muttaqin, bahwa agama bagi media massa merupakan isu strategis yang menjadi instrumen untuk memobilisasi pembaca. Cara yang dilakukan adalah melalui produksi dan reproduksi nilai-nilai ideologis yang bersumber pada pemahaman agama. Dalam konteks Indonesia, pemahaman agama terbangun dalam beberapa paham atau aliran yang secara umum terbagi dalam 3 (tiga) spektrum utama, yaitu fundamentalis, modernis, dan liberal.

Hal yang sama pun dikatakan Sobur (2009 : 61), bahwa media massa sebagai sarana penyampai informasi kepada masyarakat luas, tentunya memiliki nilai penting dan strategis. Namun sebagaimana dipahami banyak kalangan, media kerap muncul bukan sekadar membawa informasi apa adanya, tetapi juga kerap membawa muatan nilai-nilai ideologi tertentu. Nilai-nilai inilah yang ditakuti pemerintah bisa mempengaruhi pembaca media.

Alasan lain pemerintah yang melakukan pemblokiran terhadap situs Islam, juga karena khawatir akan kekuatan media yang bisa mempengaruhi khalayak sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana Bill Kovach dalam karyanya *The Element of Journalism* menyebutkan, bahwa tujuan utama dari jurnalisme adalah menyediakan informasi akurat, terpercaya kepada warga masyarakat agar dengan informasi tersebut mereka dapat berperan membangun sebuah masyarakat yang bebas. Seperti membantu memperbaiki kehidupan banyak masyarakat, menciptakan bahasa dan pengetahuan umum, mengidentifikasi apa yang

dicita-citakan masyarakat, merumuskan siapa yang pantas disebut pahlawan atau penjahat dan sebagainya.

Tanpa dipungkiri, media massa memang memiliki pengaruh yang kuat, termasuk media on line (atau jurnalisme on line). Seperti yang dikatakan Paul Bradshaw bahwa ada lima prinsip, dengan singkatan BASIC, yakni '*Brevity, Adaptability, Scannability, Interactivity, Community and Conversation*'. Prinsip pertama ringkas (*brevity*). Berita online dituntut untuk ditulis dengan cara ringkas atau singkat. Ini untuk menyesuaikan dengan kehidupan manusia dan tingkat kesibukannya yang semakin tinggi. Konsep ini sesuai dengan istilah yang berlaku di dunia komunikasi, yang kita kenal dengan istilah 'KISS', yang merupakan singkatan dari *Keep It Short and Simple*.

Prinsip kedua adalah adaptabilitas atau kemampuan beradaptasi (*Adaptability*). Prinsip ini mengharuskan para jurnalis online dituntut untuk mampu menyesuaikan diri di tengah kebutuhan dan preferensi masyarakat. Melalui prinsip ini pula, para jurnalis dapat menyajikan berita dengan cara membuat berbagai keragaman yang sesuai dengan kebutuhan publik, seperti dengan penyediaan format suara, video, gambar, dan lain-lain dalam suatu berita.

Dapat dipindai (*Scannability*). Ini prinsip ketiga. Untuk memudahkan para khalayak di dunia maya, situs-situs berita dituntut memiliki sifat dapat dipindai, agar pembaca tidak perlu merasa terpaksa dalam membaca informasi atau berita. Prinsip keempat interaktivitas (*Interactivity*). Komunikasi dari publik kepada jurnalis dalam jurnalisme daring sangat dimungkinkan dengan adanya akses yang semakin luas. Pemirsa (*viewer*) dibiarkan untuk menjadi pengguna (*user*).

Prinsip kelima adalah prinsip komunitas dan percakapan (*Community and Conversation*). Media online memiliki peran yang lebih besar dibanding media cetak atau media konvensional lainnya, yakni sebagai penjaring komunitas. Jurnalis juga harus memberi jawaban atau timbal balik kepada publik sebagai sebuah balasan atas interaksi.

Selanjutnya menurut Wikipedia, ada beberapa jenis jurnalisme daring dapat dilihat dari dua domain. Domain pertama, adalah rentangan dari situs-situs yang fokus pada *editorial content* hingga kepada situs-situs

yang berbasis konektivitas publik. Domain kedua dilihat berdasarkan tingkatan partisipatoris yang ditawarkan oleh situs berita yang bersangkutan. Adapun empat jenis jurnalisme daring adalah: 1) *Mainstream News Sites*. Contoh situs-situs jenis jurnalisme daring ini adalah *Detik.com*, *Astaga.com*, maupun situs-situs surat kabar lainnya. Situs macam ini menawarkan informasi dan isi berita-berita faktual, dengan tingkat komunikasi partisipatoris yang kecil, 2) *Index and Category Sites*. Jenis jurnalisme daring ini sering dikaitkan dengan situs-situs *search engines*. Jenis jurnalisme daring ini menawarkan audiens berbagai pilihan *link* di seluruh *World Wide Web*. Contohnya adalah situs *Google*, *Altavista*, dan *Yahoo*, 3) *Meta and Comment Sites*. Jurnalisme daring jenis ini merupakan situs-situs mengenai media berita dan isu-isu media secara umum, dan kadang-kadang juga dikaitkan atau diasosiasikan sebagai pengawas media. Contohnya adalah *Mediachannel*, *Europemedia*, dan lain-lain, dan 4) *Share and Discussion Sites*. Jenis jurnalisme daring ini melingkupi situs-situs yang memanfaatkan potensi teknologi internet, sebagai wadah dan sarana untuk saling bertukar pikiran, cerita, dan sebagainya. Tingkat partisipatoris audiens jenis jurnalisme daring ini cukup tinggi karena memancing interaksi dari mereka. Misalnya adalah situs *Indymedia* dan *Slashdot*.

Jurnalisme daring ini juga memiliki sejumlah keuntungan. Pertama, *Audience Control*. Jurnalisme daring memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para audiens untuk terlibat langsung dalam memilih dan mencari berita yang diinginkannya. Kedua, *Non-Linearity*. Informasi-informasi dalam jurnalisme daring bersifat 'independen' atau dapat berdiri sendiri, sehingga audiens tidak perlu membaca urutan atau rangkaian berita lainnya untuk dapat memahami suatu masalah. Ketiga, *Storage and Retrieval*. Jurnalisme daring memberikan kemudahan bagi audiens untuk menyimpan dan mengakses kembali informasi-informasi yang ada.

Keempat, *Unlimited Space*. Dengan didukung oleh kapasitas internet yang sangat besar, jurnalisme daring dapat menyediakan informasi yang lengkap untuk audiens. Kelima, *Immediacy*. Informasi dalam jurnalisme daring dapat diakses secara langsung oleh audiens tanpa perantara orang ketiga. Keenam, adalah *Multimedia Capability*. Jurnalisme daring memungkinkan tim redaksi untuk menyediakan berbagai bentuk

informasi, seperti gambar, video, suara, dan lain-lain. Ketujuh, *Interactivity*. Jurnalisme daring meningkatkan level interaktivitas antara audiens dengan setiap berita atau informasi yang diakses.

Dilihat dari keuntungan dan kelebihan yang dimiliki daring ini, maka tidak menutup untuk Republika dan Kompas yang awalnya sebagai media cetak, untuk merambah bisnisnya ke dunia daring. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya terus menjaga para pembaca setia, sekaligus memperluas sayap bisnis dengan menerpa pembaca on line.

Kemudian mengenai rekomendasi solusi yang ditawarkan atas kasus pemblokiran situs Islam ini, kedua media (Republika.co.id dan Kompas.com) sama-sama melihat bahwa kasus ini adalah kasus tujuan politis pemerintah yang terselubung. Namun berkaitan dengan kebebasan informasi atau pers sudah ada undang-undang dan lembaga yang menaunginya, untuk menyelesaikannya harus duduk bersama antara dewan pers, kemenkominfo, praktisi (wartawan senior), BIN atau BPBT. Kalau terjadi duduk bersama, bisa sama-sama melihat dan mengkaji situs-situs mana saja yang telah mengajarkan ajaran sesat, termasuk rekomendasi sanksi mulai dari ringan sampai sanksi berat.

**Tabel 5** Perbandingan Frame Republika.co.id dan Kompas.com

<b>Elemen</b>	<b>Republika.co.id</b>	<b>Kompas.com</b>
Frame	Kasus Pemblokiran Situs Islam adalah masalah politik	Kasus Pemblokiran Situs Islam adalah masalah politik
<i>Problem Identification</i>	Masalah politik	Masalah politik
<i>Causal Interpretation</i>	Upaya pemblokiran yang tidak rasional dan bertanggungjawab	Pemblokiran sepihak oleh pemerintah terhadap situs Islam
<i>Moral Evaluation</i>	Merugikan pembaca, media, dan menodai kebebasan informasi	Pemerintah terlalu buru-buru memblokir situs Islam
<i>Treatment Recommendation</i>	Pemerintah (kemenkominfo) dan media Islam ( <i>on line</i> ) duduk bersama untuk membahas <i>content</i> (berita)	Duduk bersama antar pihak terkait

## PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, ada beberapa catatan sebagai kesimpulan dari penelitian ini, di antaranya adalah *Pertama*, *Kompas.com* dan *Republika.co.id* mendefinisikan masalah pemblokiran situs Islam yang dilakukan pemerintah (Kemkominfo) adalah berbau politis. Karena pemblokiran yang dilakukan pemerintah tidak berdasar dan memiliki alasan yang kuat, sehingga banyak reaksi pengelola dan pembaca media atau situs Islam, yang mempertanyakan aksi pemerintah dalam memblokir situs Islam tersebut.

*Kedua*, *Kompas.com* dan *Republika.co.id* melihat bahwa yang menjadi sumber penyebab masalah pemblokiran situs Islam adalah pemerintah yang mengklaim bahwa situs-situs Islam telah mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang bisa menyesatkan, dan menghasut pembaca untuk melakukan jihad radikal atas nama agama.

*Ketiga*, *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dalam membuat keputusan moral terkait pemblokiran situs Islam melihat bahwa media Islam atau situs media Islam yang tidak terbukti menyebarkan ajaran menyesatkan telah ikut rusak reputasinya dihadapan pembaca. Sisi lain, pemerintah memperlihatkan kemampuannya dalam merespon dan menghadapi isu-isu internasional yang masih lemah dan rendah. Sehingga reaksi pemerintah terhadap isu ajaran sesat dengan memblokir beberapa situs Islam, secara tidak langsung telah menodai kebebasan pers yang menjadi misi suci setiap media massa di mana pun.

*Keempat*, *Kompas.com* dan *Republika.co.id* merekomendasi penyelesaian kasus pemblokiran situs Islam dengan musyawarah dan mufakat. Artinya harus ada upaya rekonsiliasi antara pemerintah dengan pemilik atau pengelola media atau situs Islam yang dianggap pemerintah menyebarkan informasi sesat. Musyawarah ini juga harus dihadiri oleh para pakar media, dewan pers, dan pihak BIN sehingga bisa mengkaji dan melihat media-media mana saja yang isinya banyak menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Termasuk pembahasan sanksi yang harus diberlakukan kepada media yang menyebarkan informasi menyesatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana, Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.



- Darsono, Dono dan Enjang Muhaemin. 2012. *Secangkir Peristiwa di Mata Wartawan*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Effendy, Onong Uchjana. 1986. *Dimensi-dimensi Komunikasi*.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Framing, Konstruksi Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhtadi, Asep Saeful. 1999. *Jurnalistik, Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cetakan.
- Mulyana, Dedi. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sobur, Alex. 2004. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudiby, Agus. 2009. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Soesilo, Windradini. 1989. *Analisis Tentang Pemberitaan Pers*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Van Zoest. 1991. *Fiksi dan Nonfiksi dalam Kajian Semiotik* (Terjemah: Manoekmi Sardjoe). Jakarta: Intermedia.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudiby, Agus. 2001. *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LkiS.
- Eriyanto. 2002. *ANALISIS FRAMING: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS

